



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KECAMATAN MAKASAR

Jl. Lembur No.1 Kel. Makasar
Telp. 8096939 – 8009605
JAKARTA

Kode Pos : 13570

Nomor : 210/HM.10.02
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Usulan Daftar Informasi Yang
Dikecualikan (DIK)

8 September 2023

Kepada
Yth. Plt. Kepala Dinas Kominfotik
Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

Menindaklanjuti Surat Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta nomor 1552/HM.10.02 tanggal 24 Juli 2023 Hal Penyampaian Usulan Daftar Informasi yang dikecualikan, bersama ini kami sampaikan Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) dari Unit Kerja Kantor Kecamatan Makasar, sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Camat Kecamatan Makasar,

Kamal

NIP 198708262006021002

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Kasudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur.

**DAFTAR USULAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN/RAHASIA
KECAMATAN MAKASAR**

NO.	NAMA/KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	JANGKA WAKYU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI/PENTINGNYA BAGI PUBLIK	
				JIKA DIBUKA	JIKA DITUTUP
1	Data pribadi pelapor dan terlapor pada layanan pengaduan masyarakat	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Paling lama 30 tahun atau terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (berdasarkan pasal 18 ayat (2) huruf a UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan d. Dapat mengancam kehidupan pribadi seseorang dan e. Dapat menjadikan barang enggan untuk melaporkan	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang
2	Surat Penawaran Harga (SPH) pada Dokumen Penyedia/Pemenang	Pasal 17 huruf b UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	30 puluh tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari Pengadilan atau Lembaga Pemerintah	Dapat mengganggu perlindungan usaha dari persaingan yang tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat
3	Nota Dinas	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik
4	Naskah Dinas yang bersifat Rahasia	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terbuka apabila ada Perintah Pengadilan atau Lembaga Pemerintahan secara Tertulis	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik
5	Dokumen Penawaran Teknis	Pasal 17 huruf b UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. 5 tahun; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; dan c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang dan	Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha yang tidak sehat

NO.	NAMA/KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	JANGKA WAKYU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PENTINGNYA BAGI PUBLIK	
				JIKA DIBUKA	JIKA DITUTUP
				d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	
6	Dokumen SPJ Keuangan yang belum diaudit	Pasal 17 huruf b, huruf h angka 3 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Terbuka sampai audit keuangan selesai b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintah secara tertulis	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari penyalahgunaan data b. Melindungi data dan informasi pribadi
7	Laporan Keuangan yang belum diaudit oleh BPK	Pasal 17 huruf b, huruf h angka 3 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Terbuka sampai audit keuangan selesai b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintah secara tertulis	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari penyalahgunaan data b. Melindungi data dan informasi pribadi
8	Draft Surat Perjanjian Kerja Sama yang masih dalam Proses	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terbuka apabila surat perjanjian Kerjasama selesai ditandatangani oleh kedua belah pihak	Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat	a. Menghindari penyalahgunaan informasi b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi
9	Informasi terkait Persandian (Username, Password, Coding)	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak Terbatas	Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang	Menghindari penyalahgunaan informasi

NO.	NAMA/KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	JANGKA WAKYU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PENTINGNYA BAGI PUBLIK	
				JIKA DIBUKA	JIKA DITUTUP
10	Data Informasi Pejabat (1.nama, 2.jabatan, 3.nomor telepon unit kerja, 4.alamat unit/satker pejabat)	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tidak Terbatas	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan	Menghindari penyalahgunaan informasi



Jakarta, 8 September 2023
 Camat Kecamatan Makasar

Kamal Habes.
 Kamal
 NIP 198708262006021002